

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Teknologi dan informasi memiliki perkembangan yang begitu pesat saat ini. Perkembangan teknologi ini begitu mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Bahkan pada abad ini segala aktivitas manusia dipermudah dengan adanya teknologi. Pentingnya sebuah teknologi tersebut telah menjadi kebutuhan diberbagai sektor kehidupan manusia bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal ini yang menuntut pengguna untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien guna mampu bersaing dalam kompetisi perekonomian dalam lingkup nasional, bahkan internasional. Saat ini banyak sektor keuangan yang menggunakan teknologi tersebut untuk mempermudah segala aktifitas operasionalnya yang biasa disebut dengan teknologi finansial / *fintech*.

Perkembangan *fintech* saat ini menjadi *trend* baru mendorong bermacam-macam sektor untuk berkontribusi dalam menerapannya. Menjadi sebuah keharusan bagi sektor keuangan sosial pada sektor sosial seperti zakat, infak, sedekah ataupun wakaf (ZISWAF). Karena sektor kegiatan sosial sebagai instrumen keuangan yang mempunyai pengembangan potensi besar dalam menjangkau lapisan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan akses yang inklusif masyarakat, maka lembaga pengelola dana sosial juga perlu ikut serta dalam memanfaatkan *fintech* agar dapat mengembangkan kegiatannya dengan mudah.

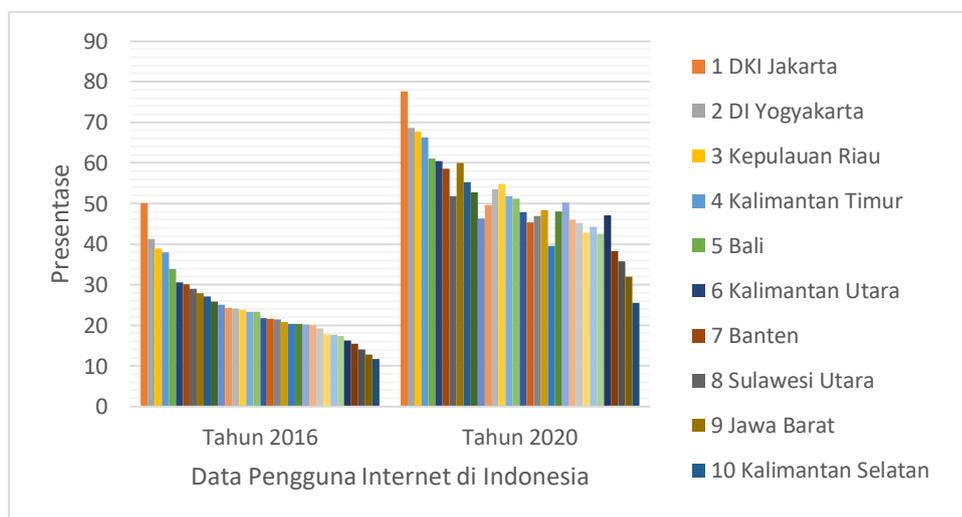
Hal ini menjadi sebuah titik penting bahwa digitalisasi untuk mencapai pelayanan prima sudah semestinya dilakukan oleh lembaga filantropi secara masif. Lembaga filantropi tersebut dapat memperluas jangkauan, komunitas serta sasaran.

Semakin luas jangkauan yang dimiliki oleh lembaga filantropi akan, mempermudah lembaga tersebut dalam mengembangkan bisnis sosialnya.

Perkembangan digital yang cukup pesat di era society 5.0 tidak terlepas adanya peran pengguna internet di Indonesia bahkan dunia. Data Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020 yang tertulis dalam katalog Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap data pengguna Internet di Indonesia pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat cepat dan peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2016 sekitar 25,37% menjadi 53,73% pada tahun 2020.¹ Sedangkan dalam skala dunia Pengguna internet dunia diperkirakan mencapai 4,95 miliar orang pada Januari 2022. Jumlah tersebut meningkat 3,99% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 4,67 miliar orang.

DATA PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA

TAHUN 2016 & TAHUN 2020



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistic Indonesia

¹ Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020, katalog 8305002, dalam situs bps.go.id (link artikel: <https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html>)

Data diatas menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, dimana pengguna internet bertambah banyak hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Melihat data diatas, menjadi peluang bagi dunia perbankan maupun keuangan dapat melangkah lebih signifikan dengan memberikan layanan yang prima kepada para *stakeholder*. Dengan adanya pemanfaatan teknologi untuk keperluan bertransaksi secara cepat, tepat dan nyaman serta mempermudah pengguna. Kemudahan terjadi ketika melakukan transaksi secara online tanpa mengharuskan untuk datang dan mengantri di lembaga tersebut. Hal ini mampu memberikan keyakinan, dengan pemanfaatan digital yang efisien dapat menambah jumlah pengguna layanan pada suatu lembaga filantropi tersebut.

Secara langsung penggunaan media dalam lembaga filantropi membantu meningkatkan indeks literasi dan inklusivitas keuangan sosial kepada masyarakat sekitar. Agenda besar terbentuknya inklusi keuangan adalah untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam pemanfaatan uang, pengelolaan risiko dan menghasilkan profit. Agenda ini juga memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat sekitar.² Definisi lain terkait inklusivitas keuangan adalah agenda menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan/tantangan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik terhadap akses masyarakat dalam menggunakan serta memanfaatkan layanan jasa keuangan.³

Pemanfaatan teknologi untuk mengelola dana sosial merupakan inovasi yang memiliki potensi besar dalam hal pendistribusian dan penghimpunan. Kemudahan serta kenyamanan ini ditawarkan oleh lembaga filantropi melalui layanan yang

² Irfan Syauki Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 221.

³ *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. www.fiskal.depkeu.go.id, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

berbasis pada aplikasi smartphone yang mudah digunakan seluruh lapisan pengguna kegiatan sosial. Misalnya mempermudah Nazir/Amil dalam pengelolaan operasional dana sosial, Mempermudah Wakif/Muzzaki dalam membayar wakaf/zakat kepada lembaga, dll. Perkembangan yang demikian ini juga ditiru oleh lembaga keuangan mikro syariah yakni Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

BMT merupakan entitas keuangan mikro yang beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil. Saat ini perkembangan BMT meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga atas dua kegiatan sekaligus yakni kegiatan *baitul maal* dan kegiatan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* (rumah harta) merupakan kegiatan BMT yang lebih difokuskan pada menghimpun dan menyalurkan dana nonprofit atau dana sosial, yakni dana ZISWAF. Sedangkan istilah *baitul tamwil* (rumah usaha) merupakan kegiatan BMT untuk mengelola bisnis yang menghimpun dan menyalurkan dana secara komersial dari pengusaha mikro kecil dan menengah yang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dan investasi.

BMT mempunyai tujuan guna meningkatkan kualitas bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan para anggota dan masyarakat. Anggota BMT perlu untuk diberdayakan yang tujuannya mandiri dari segi finansial dan bisnis. Dengan menjadi salah satu anggota BMT, harapan masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup melalui perkembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yakni gotong royong demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kerja sama yang baik oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta harus dijalankan agar tujuan BMT bisa tercapai dengan cepat. Peranan BMT dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia sangat besar. Terbukti saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, pemerintah pada saat itu hampir kewalahan

menghadapinya namun akhirnya hanya dengan pendirian dan pemberdayaan usaha BMT ternyata krisis yang melanda dapat teratasi. Terbukti dengan adanya eksistensi BMT yang semakin maju dalam mendorong pergerakan perekonomian dan pengembangan bisnis sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Peran kegiatan BMT tidak lepas adanya lembaga sosial didalamnya. Hal ini menjadi keunikan tersendiri dibanding lembaga keuangan mikro syariah yang lainnya, bahwa BMT bisa menjalankan fungsi sosial dan bisnis. *Baitul maal* pada BMT mempunyai persamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Maka dari itu *baitul maal* pada BMT harus didorong agar dapat berjalan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi kegiatan *baitul maal* BMT tersebut meliputi upaya pengumpulan dana ZISWAAF dan berbagai sumber dana sosial lainnya, juga harus mampu mengupayakan proses pentasyarufan zakat kepada golongan yang paling membutuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, salah satu dasarnya adalah UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan harta.⁴

Adanya program pengembangan kesejahteraan umat melalui BMT dapat dibuktikan dengan adanya program *baitul maal* pada BMT. Terdapat berbagai macam program, seperti; zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Program tersebut akan semakin berkembang di BMT dengan adanya kerjasama pihak luar seperti Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat bahkan saat ini Badan Wakaf Indonesia juga memberikan kesempatan kepada BMT untuk ikut dalam memajukan wakaf di Indonesia.

Hal ini banyak dilakukan oleh BMT-BMT di seluruh tanah air karena untuk

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hal.126.

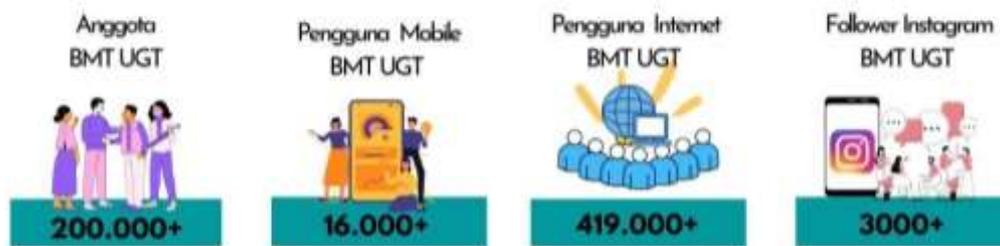
memperkuat eksistensi dan program dari BMT itu sendiri. Pemanfaatan teknologi dan kerjasama tersebut diikuti oleh BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro. Kegiatan-kegiatan sosial melalui media dan kerjasama dilakukan oleh kedua BMT tersebut guna untuk pengembangan lembaga lebih baik lagi dalam bidang *baitul maal* BMT.

BMT UGT Nusantara Pasuruan memiliki nama awal BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa alumni pondok yang berada dalam satu kegiatan yakni Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). Didalam kegiatan tersebut terdapat berbagai berprofesi misalnya guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar diberbagai wilayah Jawa Timur. Hingga saat ini perkembangan BMT UGT Nusantara Pasuruan saat pesat. Dibuktikan dengan berbagai unit layanan yang tersedia diseluruh Indonesia.

Perkembangan BMT UGT Nusantara sangatlah pesat dapat ditandai pada usia lembaga yang saat ini cukup dewasa yakni 22 tahun telah berhasil membuka beberapa unit pelayanan anggota di berbagai kabupaten/kota yang dinilai potensial sebanyak 278 Unit Layanan Syariah. Selain itu dari aspek pemanfaatan teknologi dan kerjasama dalam melakukan kegiatan *baitul maal*nya dapat dibuktikan dari adanya program unggulan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi seperti; 1) Penerapan Digitalisasi Koperasi (Database Anggota); 2 Pengajuan Pembiayaan online by Mobile UGT; 3) Kerjasama dengan penyedia digitalisasi.

Data Pengguna Layanan Digital

BMT UGT Nusantara Tahun 2022



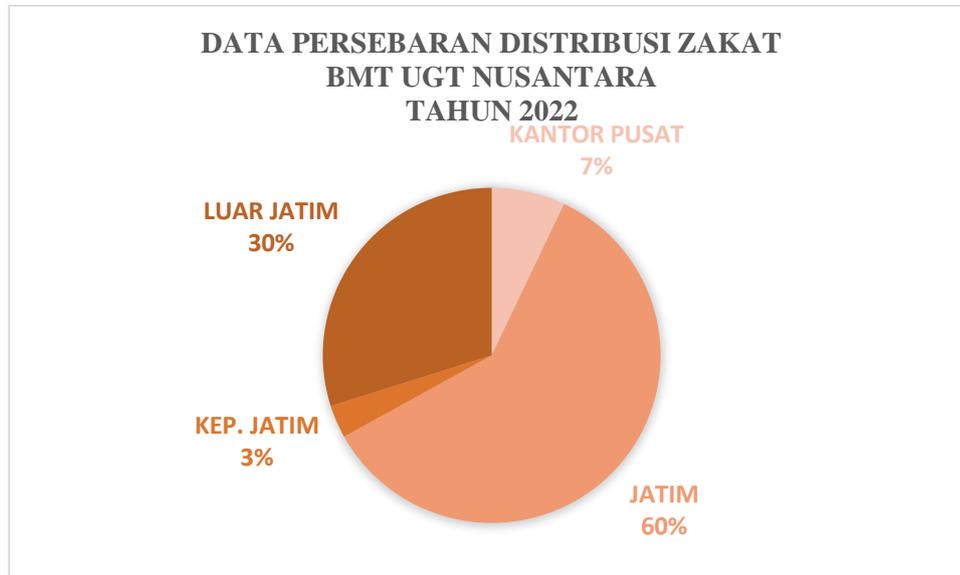
Sumber: Data diolah dari Sosial Media dan Internet BMT UGT Nusantara

Salah satu kemudahan akses pelayanan yang sudah dapat dinikmati oleh anggota dari BMT UGT Nusantara yakni aplikasi Mobile UGT. Aplikasi Mobile UGT secara online dapat mengetahui simpanan milik anggota BMT seperti mutasi simpanan anggota dan saldo simpanan anggota. Anggota yang memiliki Mobile UGT dapat mengetahui informasi saldo, mutasi pada rekening, MDA berjangka, pembiayaan dan simpanan. Hal ini dibuktikan banyaknya anggota yang mendownload aplikasi tersebut lebih dari 16rb orang.

Selain program-program di atas, dalam hal marketing BMT UGT Nusantara juga memanfaatkan adanya media sosial Facebook dan Instagram guna memperluas jaringan nasabah. Sedangkan dalam hal kerjasama guna pengembangan program-programnya, BMT UGT bermitra dengan beberapa lembaga, yaitu; BPR Syariah UMMU Bangil, LAZ & L-KAF Sidogiri, Koperasi BMT- MMU Sidogiri, Koperasi Agro Sidogiri, Buletin SIDOGIRI, Pustaka Sidogiri, TAZKIA Institute Bogor, dan masih banyak mitra kerja yang lain. Selain untuk memper erat kegiatan pondok UGT Sidogiri juga bekerjasama dengan Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri, Ikatan Alumni Santri Sidogiri, Koperasi

Pondok Pesantren Sidogiri,⁵

Pada perkembangannya BMT UGT Nusantara juga dapat dilihat dari aspek pertumbuhan penghimpunan dana sosial, yakni sebagai berikut:



Data diolah dari data lapangan BMT UGT Tahun 2022⁶

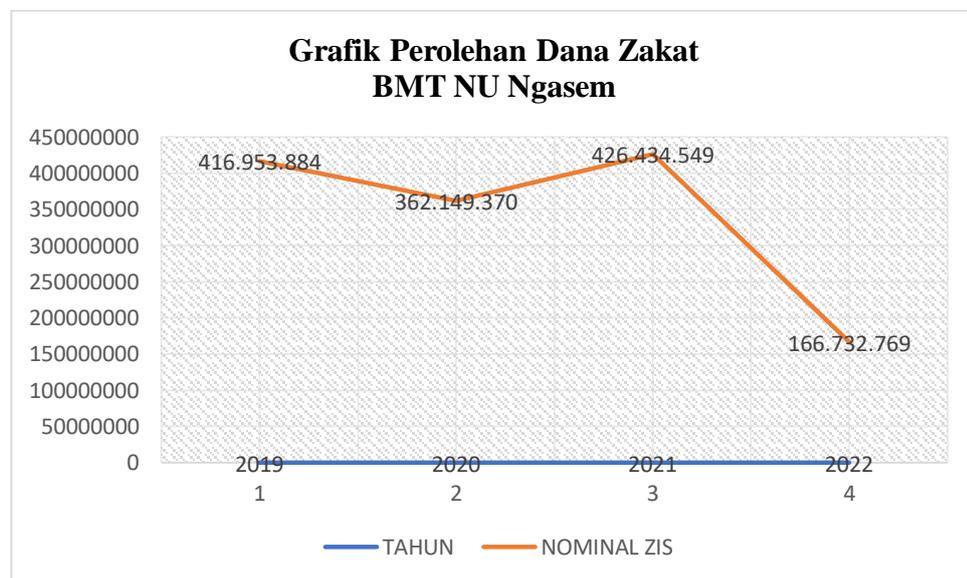
Data diatas menunjukkan bahwa proses distribusi dana zakat atau dana sosial BMT UGT Nusantara sangat baik dan cenderung luas, hal ini terbukti dengan adanya grafik terlihat persebaran dana cukup luas. Progress perkembangan BMT UGT Nusantara Pasuruan sangatlah baik selama beberapa tahun terakhir. Dengan aset yang dimiliki kurang lebih Rp 2,2 Triliun yang berhasil dibukukan pada tahun 2019, koperasi syariah terbesar yang beroperasi dari tahun 2000 tersebut layak menjadi acuan bagi koperasi lainnya dari berbagai aspek. Progres yang baik ini harapan kedepannya BMT mampu menjadi *holding* usaha bagi koperasi lainnya.⁷

⁵Profil BMT UGT Nusantara.

⁶Laporan BMT UGT Nusantara Pasuruan Tahunan 2022

⁷Data dilihat dari situs resmi milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan (pasuruankab.go.id)
<https://www.pasuruankab.go.id/berita-5354-menteri-koperasi-dan-ukm-sebut-koperasi-bmt-ugt-sidogiri-role-model-bagi-koperasi-syariah-lainnya-.html>

Kegiatan baitul maal juga dilakukan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro. Pada prinsipnya usaha sosial BMT NU Ngasem bergerak dalam penghimpunan dana ZISWAF serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf serta pihak masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pihak BMT. Berbagai program kegiatan sosial dilakukan oleh BMT agar kesejahteraan masyarakat sekitar Bojonegoro bisa terjamin. Skala prioritasnya dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BMT melalui berbagai program seperti kambing bergulir untuk para kyai, ustadz dan program GerobaQu untuk pengurus Nahdatul Ulama sekitar Bojonegoro yang ingin usaha secara produktif. Hal ini terbukti sebagaimana perkembangan BMT NU Ngasem Bojonegoro Nusantara juga dapat dilihat dari aspek pertumbuhan penghimpunan dana sosial, yakni sebagai berikut:



Data diolah dari data lapangan BMT NU Ngasem Bojonegoro⁸

⁸ Laporan Tahunan BMT NU Ngasem

Dari data tersebut juga terlihat jelas bahwa BMT NU Ngasem Bojonegoro juga memiliki peran dalam mensejahterakan masyarakat melalui program *baitul maalnya*. Terlihat bahwa BMT NU Ngasem Bojonegoro memiliki kecenderungan fluktuasi dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana social.

Potensi lembaga keuangan BMT NU Ngasem Bojonegoro ini sangat bagus. BMT ini terbentuk dari organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Gerakan pendirian BMT ini berawal dari MWC NU di Ngasem Bojonegoro yang memiliki pengurus ranting pada setiap desa. Sehingga dalam membesarkan BMT ini, yaitu berawal dari menggerakkan ranting NU yang ada pada setiap desa. Selain itu juga merangkul setiap tokoh masyarakat yang ada untuk membantu mensukseskan BMT NU Ngasem Bojonegoro yang dimiliki oleh MWC NU Ngasem ini. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan dukungan dari berbagai masyarakat dan kalangan serta menanamkan kepercayaan kepada para pengambil keputusan. Kerjasama BMT dapat dibangun agar koperasi syariah BMT NU Ngasem Bojonegoro bisa berdiri eksistensinya. Terbukti dari anggota yang dimiliki saat ini cukup banyak.

Data Pengguna Layanan Digital BMT NU Ngasem Tahun 2022



Dibalik pesatnya perkembangan BMT NU Ngasem terdapat strategi khusus yakni memanfaatkan keberadaan teknologi dengan sebaik mungkin. Dapat

dibuktikan dan dikroscek pada akun media sosial Facebook dan Instagram BMT NU Ngasem Bojonegoro, terdapat banyak postingan produk-produk lembaga, yang mana dengan adanya postingan tersebut maka dapat menarik nasabah dengan cepat dan mudah. Bahkan layanan servis digital telah disediakan oleh BMT NU Ngasem yang dikemas dalam aplikasi BMT NU Ngasem Mobile.

Semua transaksi kegiatan BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah menggunakan mobile print. System online dilakukan pada setiap kantor BMT baik pada pusat yang berada di Ngasem dan berbagai cabang BMT. Demikian juga transaksi anggota BMT sudah bisa menggunakan Handphone pribadi anggota meliputi cek saldo tabungan, angsuran pembiayaan, mutasi rekening, transfer diberbagai Bank yang sudah bekerjasama dengan BMT. Selain itu kegiatan jasa pembelian pulsa, pembayaran listrik, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, bayar pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Terbukti bahwa BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah mensinergikan IT nya dengan semua usaha milik NU.⁹

Berdiri kurang lebih 10 tahun BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah banyak bekerjasama instansi baik pemerintah maupun swasta. Dalam pendanaan sosialnya BMT NU Ngasem Bojonegoro didukung oleh LAZISNU kecamatan Ngasem Bojonegoro dan berbagai lembaga MWC NU. Mitra kerjasama ini yang sudah sukseskan gerakan “Koin NU Peduli”. Sudah lebih dari 10.000 kaleng tersebar pada berbagai kecamatan di Bojonegoro. Selain itu juga ada dari dana zakat yang sudah dihimpun kemudian disalurkan sesuai dengan 8 asnaf. Pembagian tersebut dengan konsep 80 % untuk program produktif dan 20 % untuk konsumtif.

⁹ Profil BMT NU Ngasem Bojonegoro

Santunan rutin bulanan dilakukan oleh BMT NU Ngasem baik kepada yatim, dhuafa, muallaf, takmir masjid dan mushola di daerah kristenisasi (kampung muallaf) dan di daerah rawan paham keagamaan selain NU. Kegiatan lainnya yang dilakukan seperti; beasiswa pendidikan dipondok pesantren dan biaya kuliah untuk para aktivis NU dan juga putra/putri para pengurus NU yang masih tergolong prasejahtera. Pada tahun 2022 ini BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam pengelolaan ZIS sudah memiliki transformasi yang sangat baik. Perkembangan dilakukan dengan bekerjasama pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna melegalisasi kegiatan Wakaf. Penghimpunan dan penyaluran dana wakaf melalui sistem Barcode juga dilakukan agar masyarakat mampu menjangkau secara luas terkait dengan program dari BMT NU Ngasem Bojonegoro.

Martowardoyo mengatakan lembaga keuangan sosial dalam Islam menjadi bagian dari optimistis dan memiliki potensi menjanjikan untuk kesejahteraan umat.¹⁰ Sasaran dalam penelitian ini yakni pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro. Sehingga tujuan dari penelitian disertasi ini adalah mampu menjawab pengelolaan manajemen keuangan sosial yang inklusif berbasis digitalisasi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing pada BMT.

Kedua lembaga keuangan yang telah peneliti ungkapkan diatas mempunyai kondisi yang berbeda, yaitu di lingkungan pondok pesantren dan di lingkungan ormas terbesar di Jawa Timur. Potensi yang dimiliki oleh kedua BMT tersebut yang berbeda juga. Tetapi mempunyai persamaan yaitu lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah dan terdaftar sebagai BMT yang mempunyai tujuan

¹⁰Agus D.W. Martowardoyo, *“Integrating Islamic Commercial and Keuangan sosial to Strengthen Financial System Stability,”* International Seminar and the 2nd JIMD. 2016. hal 1–8.

sama yaitu mensejahterakan umat.

Harapan dari penelitian ini semua adalah manajemen baitul maal pada BMT, mampu meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk transaksi pada BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya, dan kesadaran BMT untuk memunculkan semangat sosialnya memberikan layanan kepada anggota secara cepat dan mudah. Sehingga bisa mengentaskan masyarakat kurang mampu dari kemiskinan, mendorong masyarakat untuk bisa berdaya secara ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan.

Aspek kedua, menyokong pengembangan sektor ekonomi dan keuangan sosial syariah nonbank dengan bekerjasama antar lembaga maupun diluar lembaga BMT. Termasuk didalamnya adalah BAZ/LAZ dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) nonbank (BMT) yang dapat mengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Kedua aspek tersebut diatas harus mampu bersinergi secara bersama dan saling menguatkan, agar efek domino dari pengelolaan keuangan sosial syariah ini menjadi lebih nyata bisa dirasakan. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Inklusi Keuangan Sosial Berbasis Digital dan Kerjasama dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Multisitus BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro)”**.

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Fokus penelitian disertasi ini untuk mengetahui inklusi keuangan sosial berbasis digital dan kerjasama dalam upaya meningkatkan daya saing pada Baitul Maal Wat Tamwil. Berdasarkan fokus penelitian tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana inklusi keuangan sosial berbasis digital pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro?
2. Bagaimana inklusi keuangan sosial berbasis kerjasama pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro?
3. Bagaimana inklusi keuangan sosial berupaya meningkatkan daya saing Baitul Maal Wat Tamwil?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik inklusi keuangan sosial berbasis digital pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui praktik inklusi keuangan sosial berbasis kerjasama pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro.
3. Untuk menganalisa inklusi keuangan sosial sebagai upaya peningkatan daya saing BMT.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan dampak secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian disertasi ini memberikan temuan baru tentang implementasi inklusi keuangan sosial berbasis digitalisasi dan kerjasama. Karena bagaimanapun, sebagai lembaga keuangan mikro non-bank, BMT harus mampu menyeimbangkan perannya sebagai *baitul maal* yang mengelola keuangan sosial secara syariah dengan perannya sebagai *baitul tamwil* yang mengelola keuangan untuk usaha/bisnis dalam mengelola keuangan secara digitalisasi dan kerjasama

di luar lembaga. Penerapan keuangan sosial syariah yang implementatif pada BMT ini diharapkan mampu mewarnai keilmuan lembaga keuangan syariah mikro non-bank dan berkembangnya literatur ekonomi syariah. Aturan kaidah-kaidah Islam menyatu dalam pengelolaan BMT.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk berbagai pihak-pihak yang terlibat maupun tidak terlibat dalam penelitian ini. Pada dasarnya penelitian ini sebagai sumber ilmu pengetahuan ekonomi Islam yang bisa menjadi rujukan dalam bidang akademik maupun praktik. Adapun pihak yang mendapatkan kemanfaatan dari penelitian ini:

a. BMT

Penelitian ini memberi manfaat dalam menguatkan pengelolaan keuangan sosial pada Baitul Maal Wat Tamwil dan implementasinya dalam melakukan digitalisasi guna untuk mempermudah kegiatan baitul maalnya. Selain itu kerjasama yang dilakukan oleh BMT guna untuk mempermudah dan memperluas jaringan program baitul maal dalam

b. Nasabah/Anggota BMT

Peneliti ini tentunya memberikan manfaat bagi anggota BMT. Harapannya dengan membaca ini akan menambah wawasan bagi para anggota terkait dengan literasi keuangan BMT.

c. Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat bagi instansi pemerintah yang mengeluarkan setiap aturan/kebijakan untuk dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non-bank termasuk BMT. Harapannya

jika pengelolaan dan implementasi *baitul maal* atau keuangan sosial berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan peran BMT dalam menyebarkan *ghirah* kebaikan.

d. Peneliti selanjutnya

Judul penelitian ini perlu untuk pengembangan lebih jauh lagi. Peneliti selanjutnya bisa mengembangkan pengetahuan, wawasan dan penelitian terkait dengan inklusi keuangan syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pengembangan inklusi keuangan bisa dilakukan dengan menambahkan indikator pelayanan, akses produk keuangan, literasi keuangan, bahkan penelitian bisa berfokus pada seluruh kegiatan bidang di BMT atau LKMS lainnya. Peneliti selanjutnya bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan/referensi guna menambah data dan wawasan keilmuan di bidang Ekonomi Syariah.

E. PENEGASAN ISTILAH

Dalam penelitian disertasi ini penegasan istilah terdapat dua bentuk yakni penegasan konseptual dan penegasan operasional. Penegasan konseptual merupakan definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan tema yang diteliti dalam hal ini pakar yang berkaitan dengan penelitian inklusi keuangan sosial upaya peningkatan daya saing BMT. Sedangkan penegasan operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati selama proses penelitian.

1. Definisi Konseptual

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Keuangan sosial merupakan istilah untuk kegiatan yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana *nonprofit*, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya. Dalam BMT dikenal dengan istilah *Baitul maal* (rumah harta), dimana kegiatannya menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹² Jadi inklusi keuangan sosial bisa diartikan suatu kegiatan dimana masyarakat bisa melakukan akses terhadap layanan digital untuk mempermudah transaksi dalam menghimpun dan menyalurkan dana kebajikan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial lainnya.

Digitalisasi merupakan terminologi digunakan untuk menjelaskan proses dalam peralihan kerja dengan menggunakan perangkat media. Digitalisasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk kegiatan bisnis terbaru dan penyediaan peluang untuk menciptakan nilai dalam sebuah perusahaan. Digitalisasi merupakan pengembangan metode kerja, ruang lingkup, dan lingkungan kerja.¹³

Kerjasama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja dengan tugas masing-masing hingga tujuannya tercapai. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai pengelompokan yang terjadi diantara makhluk-makhluk yang

¹¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang “Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat”. Tahun 2016.

¹²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm.126.

¹³Irfan Nurfalah, dan Aam Slamet Rusydiana, Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11 No.1, 2019, hlm 55-76

dikenalnya. Kerjasama disini melibatkan pembagian tugas dimana setiap individu/kelompok mengerjakan masing-masing pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan.¹⁴ Kerjasama berarti suatu aktifitas bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

Daya saing merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk barang/jasa yang unggul. Bersaing dalam suatu perusahaan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau biasa kita sebut keunggulan kompetitif. Urgensi daya saing yakni untuk mendorong produktifitas secara mandiri, meningkatkan kapasitas, efisiensi pasar.¹⁵

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatannya bertugas mengembangkan bisnis yang bersifat produktif dan non-produktif untuk meningkatkan kualitas ekonomi bagi pengusaha kecil (anggotanya). Kegiatan BMT yakni mendorong para anggotanya untuk melakukan investasi dan menunjang pembiayaan ekonomi sesama anggota.¹⁶ BMT juga melakukan kegiatan menerima titipan ZISWAF serta menyalurkannya sesuai peraturan yang berlaku, didasarkan kesepakatan dan amanah anggota. BMT merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang bersifat informal dengan pendirian secara bersama-sama oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹⁷

¹⁴Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson, *Contextual Teaching Learning*, (Jakarta: Kaifa, 2014), hlm. 164

¹⁵Michael E. Porter, *Competitive Advantage. Edisi Bahasa Indonesia*, edisi 4, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2001), hal.12-14.

¹⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

¹⁷Atjep djazuli, dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 183.

2. Definisi operasional

Definisi operasional adalah tahapan dalam proses mengumpulkan data-data dan meletakkan makna pada suatu variabel dengan cara menetapkan sebuah kegiatan yang perlu untuk mengukur variabel.

Dari definisi konseptual diatas dapat dimaknai bahwa secara operasional penelitian ini untuk menguji implementasi pengelolaan keuangan sosial pada BMT dengan berbasis digitalisasi dan kerjasama. Adapun yang menjadi indikatornya adalah penghimpunan dan penyaluran ZISWAF berbasis teknologi digital guna mempermudah aktivitas operasional BMT dalam bidang baitul maal. Selain itu indikator yang paling terpenting dalam penelitian ini adalah kerjasama, guna indikator ini untuk mempermudah BMT menyebar luaskan informasi dan produk-produk baitul maal baik penghimpunan dan penyaluran dana. Berbagai kerjasama dilakukan BMT untuk menciptakan inklusifitas kelembagaan.

F. KAJIAN TEORI

1. Inklusi Keuangan Sosial

a. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan terdiri dari dua kata, yakni “inklusi” dan “keuangan”. Secara bahasa kata inklusi berarti memasukkan. Kata keuangan secara bahasa memiliki arti yang terkait dengan uang. Dari dua makna kata tersebut menghasilkan pengertian baru yang akan melibatkan agenda besar apabila disentralkan dalam bentuk satu kesatuan. Agenda besar dibentuknya inklusi keuangan adalah untuk meningkatkan akses masyarakat dalam mengelola

risiko, pemanfaatan uang dan menghasilkan keuntungan. Tujuan akhir dari inklusi keuangan juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar.¹⁸

Inklusi keuangan juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana setiap lapisan masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan secara formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman. Akses tersebut tentunya dengan biaya terjangkau sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Indonesia menggunakan inklusi keuangan sejak dimunculkannya peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2016 sebagai sarana strategi nasional yang digunakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Pelaksanaan inklusi keuangan juga berbarengan dengan adanya kegiatan literasi keuangan. Berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), seseorang memiliki literasi keuangan yang baik apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang layanan keuangan baik secara lembaga maupun produknya. Masyarakat yang cakap akan literasi keuangan bisa mengetahui fitur, manfaat dan risiko layanan keuangan.²⁰ Masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung memiliki *capabilities* dalam mengelola keuangan untuk mendukung kesejahterannya. Terciptanya

¹⁸ Irfan Syaiki Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 221.

¹⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang “*Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan.atau Masyarakat*”. Tahun 2016. Dalam Peraturan tersebut yang membahas pada bab 1 pasal 1 ayat 7 tertulis bahwa Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 ... *Ibid.*

masyarakat yang paham akan literasi keuangan dan inklusi keuangan diharapkan pada akhirnya akan mendukung pembangunan perekonomian Indonesia.

Tujuan dengan adanya inklusi keuangan juga tertulis dalam bab III pasal 11 yang meliputi: “1) Kegiatan inklusi keuangan untuk meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan; 2) Inklusi keuangan juga diterapkan oleh entitas dengan meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.”²¹

Inklusi keuangan meminimalisir adanya pemborosan, mempromosikan budaya menabung, meningkatkan akses ke kredit wirausaha dan konsumen, dan memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien," kata Kamallesh Shailesh. Anda dapat mencapai keuntungan finansial dengan melakukan pembayaran yang efisien, efektif, dan terdistribusi. Meskipun beberapa negara di dunia berpenduduk padat, akses ke lembaga keuangan masih terbatas sehingga menyebabkan ketimpangan yang tinggi. Oleh karena itu, inklusi keuangan sangat penting untuk mendorong akses masyarakat terhadap permodalan, baik wirausaha maupun konsumsi, dan perbankan menjadi pendorong utama penerapan inklusi keuangan.²²

Berdasarkan data Indeks inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 83,6%, meningkat dari angka indeks tahun 2020 sebesar 81,4%, sedangkan pada tahun 2019 tingkat inklusi keuangan hanya sebesar

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang “Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat”.

²²Novia Nengsih, Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, *Jurnal Etikonomi*, Vol.14 No.2, 2015, hal. 223-224.

76,19% Beberapa indikator pokok yang mendukung pencapaian tagret meliputi peningkatan akses keuangan, akselerasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan di Indonesia.²³ Tetapi disisi lain, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan. Di Indonesia literasi keuangan baru mencapai 38,03% (Data: OJK tahun 2019), sementara literasi keuangan syariah baru mencapai 20,1% (Data Bank Indonesia tahun 2021).

Jika dilihat dari data diatas bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang inklusi keuangan syariah masih rendah jika dibandingkan dengan konvensional. Hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah dan komunitas terkait guna memperkenalkan keuangan syariah berbasis digital untuk mempermudah akses dan layanan masyarakat.

Menurut Jauhari menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan upaya untuk mempermudah akses layanan perbankan untuk masyarakat serta usaha mikro kecil menengah. Harapannya perkembangan inklusi keuangan di Indonesia mampu meningkatkan pemberdayaan pada UMKM.²⁴ Besarnya akses, kesesuaian serta efek yang terjadi setelah menggunakan jasa keuangan digunakan sebagai indikator inklusi keuangan.

Inklusi keuangan bisa disebut juga sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menghapus semua bentuk hambatan dalam keuangan, untuk

²³Data tersebut diambil dari hasil survey Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021, bisa dilihat dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> dan diperkuat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Pers HM.4.6/243/SET.M.EKON.3/5/2022 tentang Akselerasi Capaian Target Inklusi Keuangan dalam Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren di Jakarta, pada tanggal 20 Mei 2022 bisa dilihat juga melalui <https://www.ekon.go.id/>

²⁴Sofuan Jauhari, *Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di Lembaga Manajemen Infak Kota Kediri)*, (Surabaya; Tesis Tidak Diterbitkan, 2015), hlm. 15.

mengakses layanan keuangan. Penerapan inklusi keuangan, akan membuka akses bagi masyarakat prasejahtera (orang yang tidak memiliki agunan, tidak memiliki pekerjaan tetap serta dipercaya, dan tidak dapat memperoleh pendanaan) ke layanan keuangan. Ini artinya membawa orang-orang yang tidak *bankable* kepada lembaga-lembaga keuangan agar bisa memiliki akses.

Inklusi keuangan juga memiliki tujuan lain yakni (1) akses dengan biaya yang minim untuk berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, deposito, pembayaran dan layanan transfer untuk semua kebutuhan, (2) Terpadunya antara keuangan dan kelembagaan untuk memastikan kesinambungan serta kepastian investasi, (3) persaingan untuk memastikan pilihan dan keterjangkauan untuk nasabah.

Inklusi keuangan ini diterapkan juga dalam BMT sebagai lembaga filantropi yang mampu menyentuh kalangan menengah kebawah sehingga mendorong inklusi keuangan secara merata dan sesuai syariah. Dengan memberikan akses pelayanan yang baik bagi para anggotanya tentunya akan memberikan potensi BMT bisa maju dan memiliki daya saing yang tinggi. Menurut Indraswari & Fauzi dalam penelitiannya BMT merupakan institusi yang muncul untuk meningkatkan perekonomian anggota dan juga menjalankan fungsi sosial untuk mensejahterakan masyarakat melalui ZISWAF. Didukung dengan fokus BMT sebagai perpanjangan tangan dari lembaga keuangan perbankan untuk dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang *unbankable*.²⁵

²⁵Puspa Indraswari dan Qudsi Fauzi, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Ummah Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil di Pasar Karah Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah; Teori dan Terapan Universitas Airlangga Surabaya, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, Doi: <https://doi.org/10.20473/vol5iss20182pp93-107>

b. Keuangan Sosial

1) Zakat

Secara bahasa kata zakat memiliki beberapa arti yaitu *mentah* (kesuburan), *tahara* (kemurnian), *baroka* (berkah), dan *tazukiyatashie* (menyucikan).²⁶ Kamus *al-Munawwir* menyebutkan bahwa kata zakat memiliki arti kebersihan dan kemurnian.²⁷ Sedangkan secara etimologi kata zakat yang berarti menumbuhkan, menyucikan berkah, dan meningkatkan kebaikan.²⁸

Menurut istilah syara` zakat ialah sebagian dari harta yang diberikan kepada suatu golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.²⁹ Seseorang yang membayar zakat berarti telah mensucikan jiwa dan hartanya. Dia membersihkan jiwanya dari penyakit keserakahan (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain di dalamnya. Bagi mereka yang berhak menerimanya juga akan bersih jiwa dari penyakit dengki terhadap orang-orang yang banyak harta.

Jika dilihat dari satu sudut pandang lain, bagi mereka yang membayar zakat bisa mengurangi harta kekayaannya. Tapi dari sudut pandang Islam, orang yang membayar zakat bisa naik pahala dan sisa kekayaannya juga membawa berkah. Selain bertambahnya pahala, kekayaan, mendapat ridha Allah SWT dan bertambah berkah dari doa fakir

²⁶Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953) , hal.24.

²⁷Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hal.577.

²⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun dkk, cet 7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hal.34.

²⁹Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar*, juz 1, (Semarang: Toha Putra, tt), hal.172.

miskin dan mustahik lainnya yang senang dengan mendapatkan santunan dari hasil Zakat.³⁰

Hubungan antara makna linguistik dan konseptual zakat sangat realistis dan sangat erat. Dengan kata lain, harta yang dikeluarkan untuk zakat akan bermanfaat, tumbuh, berkembang, berkembang biak, suci dan baik. Sebagaimana ada dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Rum ayat 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS At-Taubah/9:103)³¹

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩ (الزّوم/٣٠ : ٣٩)

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (Ar-Rum/30:39)³²

2) Infak

Secara etimologi kata infak berasal dari bahasa Arab "انفاق" yang memiliki arti "pemberian". Infak adalah bantuan dalam bentuk materi (uang) untuk mendukung pengembangan bidang keagamaan yang berasal

³⁰ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1.

³¹ Al Qur'an Word, Terjemah Kemenag 2019

³² *Ibid.*

dari donasi.³³ Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Mujtaba, infak adalah pemberian dari satu orang yang membutuhkan kepada orang lain, semata hanya karena Allah SWT. Bukan supaya dipuji oleh banyak orang dan menerima imbalan dalam bentuk lain.³⁴ Menurut Arifin infak ialah mengeluarkan/membelanjakan sebagian harta atau uangnya.³⁵

Dalam agama Islam hukum melakukan infak tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan bagi yang mampu secara finansial/harta. Oleh karena itu, kita umat Islam didorong untuk membantu mereka yang membutuhkan.³⁶ Adapun dasar hukumnya yang terdapat dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi sebagai berikut:³⁷

﴿أَيَسْ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتِيمَ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۚ﴾³⁸

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu (Nabi Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-orang mukmin) tidak berinfak, kecuali karena mencari ridha Allah. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi” (Al-Baqarah/2:272)³⁸

3) Sedekah

Kata sedekah berasal dari kata Arab “*shadaqah*”. Di sini, kata *shadaqah* dari makna *as-shidiq* yang memiliki arti benar. Secara artian

³³ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer lengkap dengan EYD dan pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serbajaya, 2010), hal.180.

³⁴ Imam Mujtaba, Andres Anwarudin & Teguh Prawiro, *Fiqih*, (Jakarta: Yudistira, 2010), hal.29.

³⁵ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2016), hal.169.

³⁶ Imam Mujtaba, *Fiqih*,..., hal.30.

³⁷ Al Qur'an Word, Terjemah Kemenag 2019

³⁸ *Ibid.*

sedekah adalah ibadah yang benar kepada Allah SWT.³⁹ Secara etimologi, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), sedekah adalah derma atau pemberian sebagian harta sebagian harta kepada orang fakir, orang miskin, yatim, piatu dan lain sebagainya.⁴⁰ Sedangkan Secara istilah, sedekah berarti menyisihkan sebagian harta yang harus diberikan kepada *fuqara wal masakin* atau orang yang menerimanya dari lubuk hatinya dan mengharapkan keridhaan Allah. Untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja, tanpa aturan atau syarat, kecuali tanpa nisab, sukarela, memberi kepada orang lain baik material maupun immaterial, dan mengharapkan keridhaan Allah.⁴¹

Perintah untuk melakukan sedekah tercantum dalam Alqur'an surat an-Nisa' ayat 114, yang berbunyi:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ إِلَّا مَنۢ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنۢ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ١١٤﴾

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar". (An-Nisa'/4:114)⁴²

Perintah untuk bersedekah hukumnya tidak wajib, karna berbeda dengan zakat dan sholat. Dimana dalam bersedekah tidak ada ketentuan dan kadar khusus sebagaimana ketentuan dalam berzakat, dan didalam bersedekah juga tidak ada ketentuan khusus sebagaimana ketentuan dalam pelaksanaan sholat. Jadi jika seseorang tidak melakukan sedekah maka tidak berdosa.

³⁹ Aminudin Zuhri, *Keajaiban Sedekah*, (Jombang: Lintas Media, 2015), hal.74.

⁴⁰ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*,..., hal.481.

⁴¹ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), hal.5.

⁴² Al Qur'an Word, Terjemah Kemenag 2019

Namun, secara umum, sedekah terbagi menjadi dua yakni sedekah yang hukumnya wajib dan sedekah yang hukumnya sunnah. Sedangkan untuk sedekah sunah juga dibagi menjadi dua yakni sedekah yang pahalanya tidak selalu bertambah, dan sedekah yang pahalanya selalu mengalir meskipun orang yang memberi hartanya meninggal dunia.⁴³

Sedekah akan menjadi sebuah pertolongan bagi umat muslim kelak saat meninggal dunia sebagaimana hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda: *“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalan perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shaleh yang mendoakannya”* (HR. Muslim al Tirmidzi al-Nasai dan Abu Daud).

4) Wakaf

Wakaf berasal dari kata Arab yakni *al-Waqf*, yang memiliki arti menahan atau menghentikan. Menurut Imam Nawawi wakaf adalah perbuatan menahan harta benda yang ada padanya, digunakan untuk kebaikan tujuannya untuk mendekatkan diri serta mendapatkan ridho Allah SWT. Sedangkan Al-Murghniy mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta benda di tangan pemiliknya dan disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Sayyid Sabiq juga mengungkapkan bahwa wakaf merupakan sebuah kepemilikan harta yang dapat bermanfaat di jalan Allah SWT.

Abu Hanifah mendefinisikan juga mendefinisikan wakaf sebagai kepemilikan yang sah atas suatu benda milik Wakif untuk memisahkan kepemilikan Wakaf dari Wakif dan membenarkan penarikan atau

⁴³ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah*,....., hal.11.

penjualannya.⁴⁴ Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf berarti tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf mencegah wakif untuk melepaskan harta tersebut kepada yang lain, sehingga wakif membolehkan pemanfaatan untuk jalan kebajikan dan tidak boleh menarik kembali manfaatnya.⁴⁵

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali bahwasannya wakaf merupakan pelepasan harta dari kepemilikan wakif dengan menyedekahkan manfaatnya sehingga status harta tersebut adalah milik Allah SWT semata. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, harta yang diwakafkan merupakan benda yang bersifat kekal (abadi) dan bisa diperjualbelikan dikarenakan wakaf dilaksanakan bukan dalam jangka waktu tertentu namun selamanya.⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan wakif untuk mentasyarufkan harta benda di jalan Allah SWT guna kesejahteraan umat baik selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

Di Indonesia, Wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan PP No. 42 tentang Pelaksanaan Wakaf. Badan yang membawahi wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). wakaf berperan dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta wakaf untuk keperluan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum yang berkelanjutan.⁴⁷

⁴⁴ H.M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 89.

⁴⁵ A. Zamakhsyari; Rifqi Qowiyul Iman (2018), *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematika*, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No.2, hlm.16.

⁴⁶ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar Juz 1*, (Mesir: Dar al_kitab al-Araby, tt), hlm,319.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2013), hlm. 02.

Wakaf memiliki tujuan umum dan tujuan khusus dalam pelaksanaannya. Tujuan umum wakaf adalah fungsi sosial. Dalam memenuhi fungsi sosial tersebut, wakaf memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menghidupi yang miskin, hikmah yang menuntun akal bagi yang bodoh, yang kuat dan yang lemah, dan kaum muslimin yang bermanfaat bagi kaum muslimin lainnya.⁴⁸

Oleh karena itu, Wakaf adalah sarana berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menciptakan interaksi antar sesama makhluk Allah.⁴⁹ Tujuan khusus adanya wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda. Wakaf bertujuan untuk menciptakan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan kemaslahatan umum. Wakaf juga bisa mencapai kesejahteraan yang berhubungan dengan ibadah dan kegiatan muamalah. Dalam pelaksanaan wakaf, ada enam pilar yang harus dipenuhi. Yaitu orang yang wakaf (*waqif*), benda yang diwakafkan (*mauquf*), penerima wakaf (*mauquf'alah*), penyerahan (*sighat*), pengelola wakaf (*nazhir*), dan jangka waktu tertentu atau tak terhingga.

2. Digitalisasi

a. Definisi Digitalisasi

Sejak tahun 1980-an, tren menuju digitalisasi telah diperdebatkan karena komputer rumahan telah diperkenalkan ke pasar konsumen, informasi menjadi lebih terbuka, dan konsumen memiliki akses mudah ke versi terbaru. Digitalisasi membuat pengadaan informasi bebas hambatan

⁴⁸ Abu Su'ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: dar Ibn Hazm, tt), hal.20-21.

⁴⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan Press, 2004), hal.83.

dan memberikan lebih banyak ruang untuk berinteraksi dengan peserta yang berbeda, terlepas dari ruang atau waktu.⁵⁰ Perkembangan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan orang untuk bertukar informasi dengan cepat ke seluruh dunia melalui internet telah menyederhanakan proses pengiriman dan pertukaran semua jenis informasi yang dapat didigitalkan. Dengan kata lain, jika produk dan layanan yang disediakan dapat direpresentasikan secara digital, perusahaan dapat dengan mudah dan murah menyediakan produk dan layanan mereka kepada dunia.⁵¹

Digitalisasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk model bisnis baru dan penyediaan peluang untuk menciptakan *value* dalam entitas bisnis. Integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari menjadikan faktor terpenting dalam mendorong aktivitas entitas. Digitalisasi juga sebuah peluang bagi perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan operasional bisnisnya. Pada era digitalisasi dan otomatisasi, banyak pekerjaan kantor dapat diciptakan dengan cara yang lebih efisien dan hemat biaya. Selain itu digitalisasi dalam bisnis akan meningkatkan hubungan pelanggan dan proses bisnis, serta untuk menciptakan dan mengadaptasi model bisnis baru.

Dalam bidang keuangan, digitalisasi merupakan pengembangan metode kerja keuangan, ruang lingkup pengelolaan keuangan, dan lingkungan kerja. Kemajuan teknologi informasi dan sistem komputerisasi yang dikembangkan dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan

⁵⁰Irfan Nurfalah, dan Aam Slamet Rusydiana, Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11 No.1, 2019, hal 55-76

⁵¹Aan Ansori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, Jurnal Islamic Economic, Vol.7 No.1, 2016, hal.1-18.

cepat. Efek adanya digitalisasi dapat membuat pelanggan lebih mandiri, lingkungan kerja lebih digital, dan mengubah seluruh organisasi. *Telecommuting* dan kerja jarak jauh (Daring) dari kantor menjadi tren yang semakin banyak saat ini dan dimasa depan keterampilan digital akan menjadi semakin penting dan kebutuhan akan tenaga kerja akan meningkat.⁵²

b. Pemahaman Masyarakat tentang Informasi Digital

Permasalahan yang jelas pada cara masyarakat memahami informasi digital adalah seberapa paham masyarakat mengerti perihal informasi dan proporsi yang tepat dalam konteks pembangunan sosial secara keseluruhan. Pada dasarnya, masyarakat informasi adalah unik jika diamati pada setiap tahapan masyarakat yang ada. Jika diamati pada setiap komunitas sosial memiliki kebutuhan dan tuntutan akan komunikasi dan perilaku yang bermanfaat. Namun, dengan evolusi dinamis sejarah manusia, komunikasi ditempatkan dalam konteks masyarakat informasi industri, yang dipicu dan didukung oleh teknologi yang dapat memampatkan batas ruang dan waktu.

Sebagaimana telah disebutkan, masyarakat informasi adalah masyarakat yang menganggap produksi, pengolahan, dan penyebaran informasi sebagai bagian dari semua kegiatan sosial ekonomi. Jadi dalam konteks ini sebuah informasi dapat disebut sebagai bagian modal. Konstelasi modal dan informasi dianggap sebagai proses rutin dari komersialisasi informasi. Dengan kata lain, informasi adalah komoditas karena orang melihat modal sosial ekonomi sebagai berbasis informasi. Oleh karena itu, dalam masyarakat pasca-industri, yang sangat dicirikan oleh komersialisasi

⁵² Irfan Nurfalah dan Aam Slamet Rusydiana, *Digitalisasi*,....., hal.55-76.

informasi, produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan adalah produk utama.

Proses komersialisasi informasi dalam masyarakat informasi saat ini didukung oleh teknologi informasi. Teknologi informasi dan media pada akhirnya berdampak pada kinerja dan pola komunikasi. Salah satu ciri dinamika teknologi informasi adalah sifat konvergensi.⁵³

3. Kerjasama

a. Definisi Kejasama

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama ialah bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁵⁴ Kerjasama juga dapat diartikan sebagai aktifitas kegiatan yang dilakukan secara bersama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁵⁵ Abdulsyani, Roucek, dan Warren, juga menambahkan biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana masing-masing individu mengerjakan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Sargent dalam Santosa menyatakan bahwa kerjasama merupakan kegiatan yang terkoordinasi antara anggota kelompok dimana kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Lebih lanjut Santosa menyatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial dimana

⁵³Eka Wenats Wuryanta, Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No.2, 2004, hlm.1131-142.

⁵⁴Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.156

⁵⁵W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm.492.

tujuan anggota kelompok antara yang satu dengan lainnya berkaitan erat dengan keseluruhan kegiatan bisa mencapai tujuan.

Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu hasil atau tujuan bersama. Kerjasama menghendaki adanya keterlibatan secara pribadi atau sekelompok orang demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang lebih efektif serta efisien.⁵⁶

b. Prinsip Kerjasama

Ada beberapa prinsip dalam menjalankan kerjasama yang perlu dipegang serta dikembangkan agar mencapai hasil maksimal, yaitu: 1) Meyakini bahwa kerjasama memiliki tujuan yang sama (*common goal*); 2) Saling menguntungkan kedua belak pihak (*mutual benefit*); 3) Saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya (*mutual trust*); 4) Bersikap terbuka terhadap kolega (*transparent*); 5) Menjalin hubungan jangka panjang dan terus berlangsung (*long term relationship*); 6) Terus-menerus melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik dari segi biaya, mutu, kualitas barang/jasa.

Kerjasama merupakan sebuah perjanjian yang berlaku selama rentang waktu tertentu, sehingga dalam hal ini dokumentasi menjadi kebutuhan guna dijadikan dasar keputusan bagi semua pihak apabila dikemudian hari terjadi

⁵⁶Bunga Fajar Sari, Bentuk Kerjasama(Cooperation) pada Interaksi Sosial Waria, *Jurnal Ekonomi*, Perpustakaan Universitas Diponegoro, 2014, hlm. 10.

perselisihan. Dokumentasi kerja sama bisa dilakukan secara tertulis seperti MoU, MoA, dan sebagainya, Sedangkan untuk dokumentasi tidak tertulis seperti foto, video, rekaman suara dll.

c. Manfaat adanya Kerjasama

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh bagi perusahaan yang menjalin kerjasama, yaitu: 1) Perusahaan dalam negeri dapat meningkatkan kemampuan; 2) Mendapatkan keuntungan mengenai celah pasar diluar negeri; 3) Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan karyawannya untuk menguasai pengalaman baru sehingga perusahaan memperoleh nilai keekonomian tambahan untuk yang berguna meningkatkan kesejahteraan pekerjaannya; 4) Mempunyai peluang untuk meningkatkan permodalan; 5) Membuka jalur distribusi yang baru termasuk memperluas pangsa pasar; 6) Rasio keuntungan atau laba perusahaan meningkat; 7) Menambah modal dan mitra untuk bertukar pikiran; 8) Mengembangkan lini produksi dan penjualan.⁵⁷

4. Daya Saing Perusahaan

a. Definisi Daya Saing Perusahaan

Daya saing merupakan sebuah konsep membandingkan kemampuan dan kinerja suatu perusahaan. Daya saing suatu negara dapat dicapai melalui akumulasi daya saing strategis masing-masing perusahaan. Proses penciptaan nilai ada di dalam sektor korporasi.⁵⁸ Dalam Hawa, Porter menyatakan bahwa *“competition is at the core of the success or failure of firms”* dapat diartikan *“persaingan merupakan jantung dari keberhasilan atau kegagalan bagi*

⁵⁷I Putu Artaya, dkk, *Penerapan Kompensasi Industri Padat Karya Indonesia*, (Surabaya: Narotama University Press, 2022), hal, 170-171

⁵⁸Mudrajad Kuncoro. *Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), hal.82.

sebuah perusahaan".

Terdapat dua sudut pandang yang ditimbulkan oleh persaingan. *Pertama*, kesuksesan diakibatkan adanya dorongan perusahaan-perusahaan untuk berkerja lebih dinamis dan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan layanan terbaik bagi pasar. Dalam hal ini, persaingan dianggapnya sebagai peluang yang menjadi pendorong sebuah bisnis untuk lebih baik lagi. *Kedua*, dianggap sebuah kegagalan karena akan memperlemah bisnis. Sehingga muncul bersifat statis, takut akan persaingan dan tidak mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehingga persaingan merupakan ancaman bagi bisnis.⁵⁹

Menurut *World Economic Forum*, daya saing merupakan kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.⁶⁰ Daya saing ditentukan oleh keunggulan suatu bisnis dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau biasa kita sebut keunggulan kompetitif. Porter menjelaskan pentingnya daya saing karena tiga hal berikut: 1) Mendorong adanya produktivitas kerja dan meningkatkan kemampuan mandiri; 2) Dapat meningkatkan kapasitas ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat; 3) Kepercayaan bahwa mekanisme pasar dapat menciptakan efisiensi bisnis.

⁵⁹ Hawa Bunga Yowanda, dan M Kholid Mawardi, *Strategi Pemasaran Penerbangan Berkonsep Low Cost Carrier (LCC) dan Daya Saing Perusahaan*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.51 No.2, 2017, hlm.171.

⁶⁰Michael E. Porter, *Competitive Advantage. Edisi Bahasa Indonesia*, edisi 4, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2001), hlm.12-14.

b. Strategi dalam Menentukan Daya Saing

Porter menyebutkan strategi daya saing bisnis perusahaan, dalam analisisnya memperkenalkan tiga jenis yaitu: keunggulan biaya (*Cost Leadership*), pembedaan produk (*Differentiation*), dan strategi *focus*.⁶¹

1) Keunggulan Biaya (*cost leadership*)

Strategi biaya rendah (*cost leadership*) menggarisbawahi upaya untuk menghasilkan produk standar (sama dalam segala hal) dengan harga satuan yang sangat rendah. Produk (barang dan jasa) ini biasanya ditujukan untuk konsumen yang relatif sensitif (*price sensitive*) terhadap fluktuasi harga atau yang menggunakan harga sebagai faktor pengambilan keputusan.⁶² Dari perspektif perilaku pelanggan, jenis strategi ini termasuk dalam kategori perilaku *low-involvement*, ketika konsumen tidak atau kurang peduli dengan perbedaan merek dan tidak membutuhkan (relatif) produk, sangat sesuai dengan kebutuhan Anda. Ketika banyak konsumen yang melakukan pembedaan atau tawar menawar.

Khususnya pada pasar komoditas, strategi ini tidak hanya akan menahan persaingan harga yang muncul, tetapi juga akan menjadi pemimpin pasar (*market leader*) dalam menetapkan harga dengan berbagai cara dan memastikan keuntungan pasar yang tinggi (di atas rata-rata) stabil. Dari segi efisiensi dan ekonomis. Sumber efisiensi biaya ini berbeda. Hal Ini termasuk skala ekonomi, investasi dalam teknologi

⁶¹ Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, Buku 1. Edisi 12. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal.145.

⁶² *Ibid.*, hal.145.

terbaik, biaya dan berbagi pengetahuan dalam organisasi, dampak pembelajaran dan kurva pengalaman, optimalisasi kapasitas utilitas, dan akses yang baik ke bahan baku atau saluran distribusi.⁶³

Dalam menerapkan strategi biaya rendah, suatu entitas harus dapat memenuhi persyaratan dua bidang: sumber daya dan organisasi.⁶⁴ Strategi ini hanya mungkin jika ada beberapa keuntungan di bidang sumber daya perusahaan yaitu; pemasaran produk, kreativitas dan bakat, pengawasan ketat, riset pasar, penjualan yang kuat, keterampilan kerja, biaya penjualan dan promosi yang rendah. Pada saat yang sama, perusahaan harus kuat secara organisasi dan mampu mengkoordinasikan antara fungsi manajemen terkait, merekrut orang-orang berbakat, dan insentif berbasis target.

2) Strategi Pembedaan Produk (*differentiation*)⁶⁵

Strategi pembedaan produk (*differentiation*), mendorong perusahaan untuk menemukan keunikannya sendiri di pasar sasaran. Keunikan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan memungkinkan pelaku usaha mendapatkan perhatian paling besar dari calon konsumen. Metode diferensiasi produk bervariasi dari pasar ke pasar, tetapi terkait dengan karakteristik fisik dan atribut produk, atau kepuasan (realistis atau psikologis) yang diterima konsumen dari produk. Kemudahan perawatan, fitur tambahan, fleksibilitas, kenyamanan, dan banyak hal lain yang sulit ditiru lawan hanyalah beberapa contoh diferensiasi. Jenis strategi ini

⁶³ *Ibid.*, hal.146.

⁶⁴ Michel E. Porter, *Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggulan*, (Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1994), hal. 91.

⁶⁵ Fred R. David. *Manajemen*,..., hal.146.

biasanya ditargetkan pada konsumen potensial yang tidak memprioritaskan harga relatif dalam proses pengambilan keputusan.

Perlu dicatat bahwa tingkat diferensiasi berbeda. Diferensiasi tidak menjamin keunggulan kompetitif, terutama jika produk yang beredar memenuhi (relatif) kebutuhan konsumen atau mudah ditiru oleh pesaing. Contoh yang baik dari strategi ini adalah produk yang tahan lama dan sulit ditiru oleh pesaing.

3) Strategi Fokus (*Focus*)⁶⁶

Strategi fokus merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif dalam segmen pasar yang lebih sempit. Jenis strategi fokus dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan relatif tidak terpengaruh oleh harga dalam keputusan pembeliannya. Bahkan, terutama di perusahaan menengah dan besar, strategi fokus terintegrasi dengan salah satu dari dua strategi umum lainnya. Strategi biaya rendah atau strategi diferensiasi fitur produk.

Prasyarat untuk menerapkan strategi adalah ukuran pasar yang cukup, potensi pertumbuhan yang baik, dan minat kompetitif untuk sukses. Strategi ini lebih efektif ketika konsumen membutuhkan fitur-fitur tertentu yang tidak dibutuhkan oleh pesaing mereka. Perusahaan yang terlibat dalam strategi ini biasanya berfokus pada produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok pasar, wilayah geografis, atau konsumen tertentu secara memadai.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.147.

Menurut Porter terdapat 13 hal yang bisa dimiliki oleh setiap bisnis untuk meningkatkan keunggulan bersaing adalah:⁶⁷ a) Teknologi; b) Tingkat bisnis yang tinggi; c) Tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses produksi; d) Kualitas mutu yang baik dari barang yang dihasilkan; e) Promosi yang meluas dan agresif; f) Pelayanan teknis maupun non teknis yang baik (*service after sale*); g) Tenaga kerja dengan tingkat keterampilan/pendidikan, etos kerja, kreativitas, serta motivasi yang tinggi; h) Skala ekonomis; i) Inovasi; j) Diferensiasi produk; k) Modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup; l) Jaringan distribusi di dalam dan terutama di luar negeri yang baik dan *well-organized/managed*; m) Proses produksi yang dilakukan dengan sistem *just-in-time* (JIT).

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya saing, yakni sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Lokasi. Menurut Fran letak lokasi sangat penting untuk memenuhi kenyamanan pelanggan saat berkunjung dan konsumen pasti akan mencari jarak tempuh terdekat.
- 2) Harga. Menurut Sunarto, harga adalah jumlah nilai total yang diperjualbelikan konsumen untuk mendapat keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.
- 3) Pelayanan. Layanan produk demi produk berarti bahwa konsumen

⁶⁷ Tulus Tambunan. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.55.

⁶⁸ Hawa Bunga, *Strategi Pemasaran*,..., hlm.171.

sepenuhnya dilayani oleh ketersediaan produk berkualitas tinggi yang mereka tawarkan. Layanan melalui kemampuan fisik mengacu pada kenyamanan peralatan (troli atau kereta belanja), parkir yang nyaman, binatu, binatu.

- 4) Mutu atau kualitas Mengenai kualitas produk. Kualitas produk merupakan kesesuaian spesifikasi produk seperti mutu, kualitas, kondisi fisik, fungsi yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan konsumen.
- 5) Promosi. Merupakan aktifitas yang digunakan untuk menampilkan informasi dari suatu barang/jasa. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai iklan di media cetak, media elektronik, atau media lainnya.⁶⁹

Selain lima faktor diatas ada beberapa hal menurut Porter yang dapat mempengaruhi kekuatan dari sebuah persaingan, yaitu:⁷⁰ a) Ancaman pendatang baru; b) Kekuatan tawar menawar pemasok; c) Daya tawar pembeli; d) Ancaman produk alternatif; e) Persaingan dalam industri. Untuk mengembangkan desain strategis yang baik dan mempertahankan posisi kompetitif dalam industri, perusahaan harus dapat meminimalkan dampak dari kelima kekuatan tersebut.

5. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

a. Definisi BMT

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. BMT terdiri dari dua kelompok kata, *baitul*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Fred R. David. *Manajemen,....*, hal. 146

maal dan *baitul tamwil*, yang masing-masing memiliki arti tersendiri. *Baitul Maal* merupakan entitas keuangan yang berorientasi pada kegiatan sosial keagamaan yang utamanya menghimpun dan menyalurkan kekayaan masyarakat dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sedangkan *Baitul tamwil* merupakan entitas keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat (anggota) dalam bentuk simpanan dan mengalihkannya dalam bentuk pembiayaan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁷¹

BMT juga merupakan organisasi ekonomi yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT ditemukan dalam definisi Baitul Maal, dan peran bisnis BMT ditemukan dalam definisi Baitul Tamwil. Sebagai sebuah sistem sosial, Baitul Maal memiliki fungsi dan peran yang sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, Baitul Maal, perlu didorong untuk berperan secara profesional agar menjadi LAZ yang mapan. Fitur ini setidaknya mencakup upaya penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial, dan upaya penyaluran zakat kepada kelompok fakir miskin. Apalagi sebagai lembaga ekonomi, BMT terus mengembangkan bisnisnya di bidang keuangan. Artinya, kami mengumpulkan uang dari anggota dan calon anggota kami untuk sektor ekonomi halal dan menguntungkan..⁷²

b. Fungsi dan Peran BMT

Adapun beberapa fungsi BMT, yaitu sebagai berikut:

⁷¹ Ahmad Syifaul Anam, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), hal.37-38.

⁷² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 126

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya insani melalui optimalisasi kinerja anggota, pengurus dan juga pengelola. Menjadikan sumberdaya lebih profesional, (keselamatan, kedamaian, kesejahteraan) dan kredibel serta amanah.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi sumber daya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komunitas baik di dalam maupun di luar organisasi guna kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Memperkuat dan meningkatkan kualitas bisnis dan pasar produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh..⁷³

Adapun beberapa Peran Baitul Maal wa Tamwil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan orang dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan hukum Syariah. Dapat dilakukan mulai dari sosialisasi aktif di masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dalam metode perdagangan Islam. Dilarang menipu penimbangan atau integritas konsumen.
- 2) Pelatihan dan penggalangan dana untuk dibiayai dalam pelaksanaan usaha kecil. BMT harus proaktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro. Misalnya melalui pendampingan, pembinaan, saran dan dukungan kepada pelanggan dan masyarakat umum.

⁷³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.46-47.

- 3) Akan terbebas dari ketergantungan pada rentenir. Para rentenir masih dapat memuaskan keinginan masyarakat untuk segera memenuhi dananya sehingga menyebabkan masyarakat masih bergantung pada rentenir. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya dengan dana yang tersedia dan kemudahan birokrasi.
- 4) Meratakan dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat. Kemampuan BMT untuk berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks harus cerdas. Untuk itu, BMT perlu memperhatikan kelayakan nasabah terhadap kelompok nasabah dan jenis pendanaan, misalnya dalam langkah evaluasi terkait pemetaan skala prioritas yang dipertimbangkan dalam pertanyaan pendanaan.

c. Asas BMT

Unsur utama pembentukan peraturan hukum adalah asas hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa negara hukum merupakan “pusat” dari negara hukum. Asas hukum bukanlah suatu undang-undang, tetapi tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas hukum yang terkandung di dalamnya.⁷⁴

Sebagai lembaga keuangan yang lahir dari sistem ekonomi Islam, BMT harus didasarkan pada tiga prinsip dasar ajaran Islam: *tauhid* (Keesaan Tuhan), *khilafah* (perwakilan), dan *adalah* (keadilan).⁷⁵ Asas-asas syariah sebagai dasar pengoperasian BMT yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal.47.

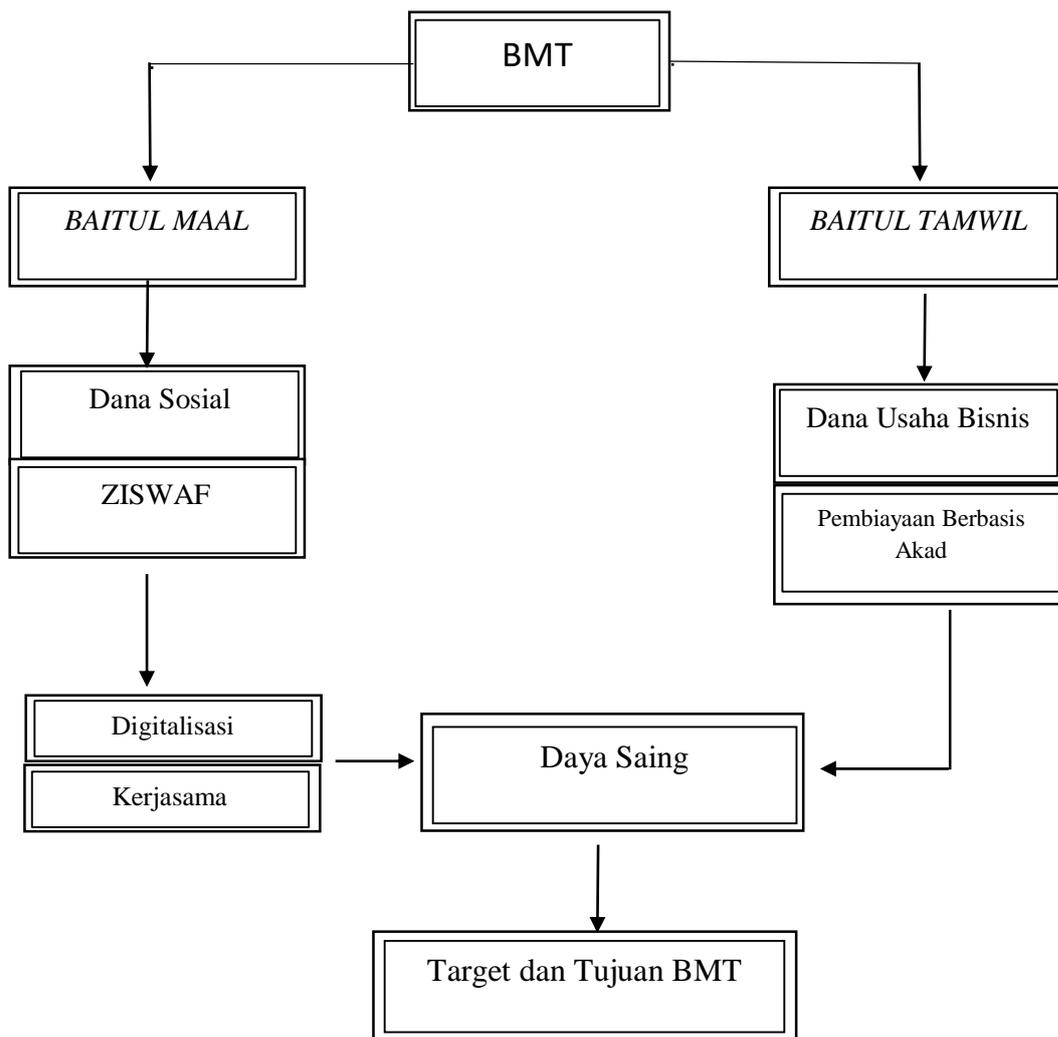
⁷⁵ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal.118.

⁷⁶ Elfrinaldi, *Syariat Islam dan Dinamika Masyarakat, Solusi Terhadap Kontemporer*, (Jakarta:t.p, t.t), hal.31-40.

- 1) Asas *tauhid*, yang berorientasi pada ketakwaan kepada Allah SWT (dimensi *'ubudiyyah*).
- 2) Asas persamaan dalam aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kesetaraan dalam pekerjaan dalam hak dan kewajiban.
- 3) Asas tidak merugikan atau mengeksploitasi orang di berbagai bidang kegiatan.
- 4) Asas kerelaan kedua belah pihak atau asas suka sama suka (*'an taradin minkum*) dasar saling pengertian atau saling mencintai tanpa unsur paksaan dalam perdagangan.
- 5) Asas persaudaraan dalam membangun keadilan Universal dalam Membangun Kemitraan dan Solidaritas Global.
- 6) Asas objek materia bisnis, berupa produk barang atau jasa yang terbukti halal.
- 7) Asas memberi manfaat atau asas manfaat (tidak mengandung kemubadziran), keuntungan atau kegunaan (tidak termasuk pemborosan)
- 8) Asas saling membantu dan mendukung dalam membangun kemitraan dalam bisnis.
- 9) Asas keseimbangan (*equilibrium*) keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dengan keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan.
- 10) Asas tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau asas tidak melawan hukum dan syari'at (tidak ada unsur riba, *gharar*/ketidakjelasan, *maysir* /judi)

G. PARADIGMA PENELITIAN

Saat ini untuk mempermudah seluruh kegiatan BMT, perlu adanya digitalisasi dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah segala aktivitas baik Muzakki, Mustahiq, Nadzir, Wakif, Muhnik dan tentunya *stakeholder* BMT. Kemudahan akses manajemen *baitul maal* dalam digitalisasi aktivitasnya akan memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya saing BMT kedepannya. Selain itu kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan lembaga lain juga mempermudah akses kegiatan BMT seperti promosi produk, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Jadi, Paradigma penelitian tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:



Bagan 3 Paradigma Penelitian

H. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Lubis⁷⁷ mengenai peranan BMT dalam pemberdayaan ekonomi dengan jenis penelitian lapang menghasilkan bahwa BMT melakukan pemberdayaan dengan pendirian, pelatihan dan kegiatan sosial. Dengan pemberdayaan ini masyarakat aktif, sehingga masyarakat mengenal BMT lebih dekat. Proses inklusifitas dalam hal ini dimulai dengan dekatnya masyarakat dengan BMT. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa penelitian ini fokus pada pengelolaan social finance, didalamnya termasuk pengelolaan penerimaan infak, membayar zakat dan partisipasi pembiayaan kepada masyarakat yang kurang bankable (ekonomi lemah) serta peran sosial BMT kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Triantoro, Wahyuni, dan Purna terkait dengan digitalisasi filantropi. Penelitian dilakukan pada e-commerce dan lembaga sosial online (Bukalapak.com, Sedekahonline.com, kitabisa.com, dan Tokopedia.com). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pergeseran dinamika filantropi sosial di Indonesia. pergeseran tersebut karena dipengaruhi media internet dan pertumbuhan masyarakat muslim dalam menggunakan media digital. Pentingnya lembaga filantropi digital dalam melakukan kerjasama dalam menyediakan layanan donasi sosial akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kegiatan sosial berbasis digital. Beberapa outlet e-commerce seperti Bukalapak.com dan Tokopedia.com telah berkolaborasi dengan lembaga filantropi

⁷⁷Fauzi Arif Lubis, "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)," *Human Falah*, Volume 3, no. 2 Tahun, 2016: 271–295.

Islam seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, ACT, Rumah Zakat, LAZISMU, LAZISNU, dll ke menyediakan layanan donasi digital. Selain e-commerce, perusahaan sosial fintech juga menyediakan filantropi digital fitur. Hal ini terlihat jelas dalam perusahaan sosial seperti Kitabisa.com dan Sedekahonline.com. Layanan transportasi daring perusahaan, seperti Go-Jek juga menyediakan filantropi digital fitur (Go-Zakat). Hal ini diwujudkan melalui kerja sama antara perusahaan fintech dan lembaga filantropi.⁷⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian disertasi ini adalah digitalisasi dan kerjasama dalam pengelolaan lembaga filantropi. Sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian ini lembaga digital sebagai fokus penelitian, sedangkan disertasi ini pada lembaga keuangan BMT.

Program lembaga filantropi dalam BMT diteliti lebih dahulu oleh Ascarya.⁷⁹ Dalam penelitian menjelaskan bahwa Baitut Tamwil (BT) BMT menjalankan kegiatan keuangan komersial syariah yang menyediakan layanan keuangan mikro dan keuangan mikro lainnya, sedangkan divisi Baitul Maal (BM), melakukan keuangan sosial Islam, bertindak sebagai Amil zakat dan Nazhir wakaf (termasuk wakaf tunai) sekaligus, sedangkan dana ZIS-WAF disimpan di BT. Temuan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur Baitul Maal dan tingkat operasi IICSF. Juga tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran Baitul Maal dan tingkat operasi IICSF. Perbedaan dengan penelitian ini, ingin membuktikan sejauh mana peran sosial BMT dalam menumbuhkan keuangan inklusif.

⁷⁸Dony Arung Triantoro, Tri Wahyuni, dan Fitra Prasapawidya Purna, Digital Philanthropy: The Practice of Giving Among Middle to Upper-Class Muslim in Indonesia and Soft Capitalism, *Qudus International Journal Of Islamic Studies*, Volume 9, Nomor 2 Tahun 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/qjjs.v9i2.7814>

⁷⁹Ascarya, *Micro Level Models of Integrated Islamic Commercial and Social Finance in Indonesia*, 2018.

Kajian tentang lembaga keuangan sosial juga dilakukan oleh Hilman Latief.⁸⁰

Kajian tersebut membahas tentang program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa (LAZ DD), khususnya pada program pemberdayaan imigran di Hongkong. Program ini merupakan bentuk diaspora philanthropy dalam rangka mewujudkan kesejahteraan imigran yang ada di Hongkong. Dalam konteks ini LAZ DD menafsirkan bahwa imigran perempuan yang tinggal di Hongkong merupakan *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat. LAZ DD melihat bahwa potensi dana filantropi sebagai solusi membantu para pekerja di Hongkong yang memang betul-betul membutuhkan dana tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hilman Latief dan saya adalah terkait dengan tujuan filantropi

Penelitian Herlina dan Muhammad⁸¹ penelitian ini mengenai “*Pengelolaan Baitul Maal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara*” membahas tentang pengelolaan baitul maal pada masa Khulafaur Rasyidin dalam meningkatkan kesejahteraan negara. Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar Sebuah lembaga Baitul Maal awalnya hanya berfungsi sebagai penyalur harta, tetapi pada tahun kedua di masa kepemimpinannya terdapat fungsi tambahan yakni sebagai tempat penyimpanan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh negara. Fungsi utama Baitul Maal pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai lembaga yang membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian setelah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar selesai, masa selanjutnya adalah kepemimpinan Umar bin Khattab. Setelah Kematian Khalifah Abu Bakar kekayaan atau kas yang

⁸⁰Hilman Latief, Addressing Unfortunate Wayfarer: Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10, No. 2 Tahun 2017 hlm 237–255.

⁸¹ Herlina K.W. dan M Tho'in, Pengelolaan Baitul Maal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol.3, No.01, (2013).

dimiliki oleh negara di baitul maal meningkat sangat signifikan, karena banyak mendapatkan aliran dana dari negara-negara yang ditaklukkannya seperti Kisra dan Qaishr. Perkembangan pesat Baitul Maal terjadi sampai masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal sangat berpengaruh bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Perbedaan dengan penelitian ini, bahwa penelitian ini lebih fokus pada pembahasan mengenai kemampuan meningkatkan daya saing BMT melalui Inklusi Keuangan Sosial dengan memaksimalkan adanya Digitalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaring.⁸² Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “*Eksistensi Baitul Maal dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean*”. Hasil penelitian menemukan bahwa:

1. Baitul Maal merupakan lembaga atau pihak (*al jihad*) yang memiliki tugas pokok menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.
2. Baitul Maal telah ada sejak Nabi Muhammad SAW sebagai pihak (*al-jihad*) yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta seperti: rampasan perang, zakat, infak dan shadaqah. Pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidun, Baitul Maal mulai memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, sampai kemudian mengalami perkembangan dinamika yang luar biasa hingga saat ini.

⁸² Mustaring, Eksistensi Baitul Maal dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No.2, 2016.

3. Baitul Maal juga bisa berperan sebagai lembaga pengendali ekonomi negara. Namun dalam perkembangannya justru belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

Dalam penelitian ini mustaring memandang bahwa satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan keuangan, harta benda dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Muslim secara keseluruhan, adalah kembali kepada perintah Alquran dan Hadis. Makdunya adalah bagaimana menerapkan secara benar konsep-konsep ekonomi syariah beserta seluruh perangkat pendukungnya kembali kejalan Allah SWT. Sudah saatnya seluruh masyarakat dan pemerintah menyadari hal ini, dan berusaha memberi jalan dan peluang. Maka yang membedakan dengan Penelitian ini adalah Peneliti hanya fokus pada Keuangan Sosial seperti ZISWAF.

Muhammad Lutfi⁸³ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Gerakan Wakaf Produktif di BMI terdiri dari lima program, yaitu wakaf tunai, wakaf aset, wakaf profesi, wakaf manfaat, dan wakaf pengalihan hak. Kemudian pengelolaan wakaf tunai oleh BMI dimulai dari merencanakan infrastruktur berbasis wakaf, menetapkan jumlah dana yang diperlukan, dan mengkampanyekan nya. Dana wakaf tunai yang terkumpul, kemudian digunakan untuk membeli bahan-bahan baku yang digunakan untuk membangun infrastruktur berbasis wakaf. BMI menggunakan teknologi informasi dalam tiga hal, mulai dari penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai serta laporan pertanggung jawabannya. Teknologi informasi yang digunakannya adalah media sosial, website dan contact person melalui handphone. Perbedaan

⁸³Muhammad Lutfi Hakim, *Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundation in Digital Era*, 2020.

dengan penelitian ini, ingin membuktikan sejauh mana Digitalisasi pada BMT sehingga mampu menumbuhkan keuangan inklusif.

Penelitian yang dilakukan oleh Erni Awanti penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan dan determinannya di Negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2007-2015. Hasil dari penelitian adalah analisis *Multidimensional Index Of Financial Inclusion* (IFI) digunakan untuk menganalisis indeks inklusi keuangan dan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel. Estimasi menggunakan IFI menunjukkan bahwa Malaysia memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi dan estimasi menggunakan FEM menunjukkan bahwa variabel inklusi keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Dalam penelitian Eerni juga disebutkan bahwa variabel lain yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan adalah PDB per kapita, Rasio kredit swasta, dan rasio asset likuiditas. Sedangkan indeks keterbukaan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Jadi dapat dilihat perbedaan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa inklusi keuangan yang pada penelitian jurnal ini tidak meningkatkan sistem pada Negara Malaysia. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa inklusi keuangan ini dapat meningkatkan sistem keuangan pada BMT dengan melihat perkembangan digitalisasi sekarang ini. Persamaan dalam

penelitian ini adalah semakin meningkatnya inklusi keuangan dapat meningkatkan daya saing pada suatu lembaga atau organisasi.⁸⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Pribadi, tujuan penelitian ini merupakan untuk mengidentifikasi peran LDKPI sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi sarana pendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan hasil penelitian adalah pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerja sama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN.

Dengan adanya tujuan penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukannya muncul perbedaan penelitian ini adalah tujuan adanya kerja sama yang dilakukan oleh penulis untuk meningkatkan daya saing BMT dengan lembaga lain agar masyarakat tahu bahwa BMT selain sebagai lembaga *Baitul maal* juga sebagai *baitul tamwil*. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membentuk tata kelola suatu lembaga untuk mendukung suatu program-program dalam membantu masyarakat. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan

⁸⁴ Erni Awanti, "Analysis Of The Financial Inclusion Effect On The Stability Of The Financial System In South East's Developing Countries", *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol.2 No.2 (2017): 99-121, p-ISSN: 2541-1470; e-ISSN: 2528-1879

pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan.⁸⁵

Hasanah dan Puspitasari juga melakukan penelitian tentang kerjasama. Tujuan penelitian yang dilakukan menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan berlangsung dilihat dari perspektif Neoliberalisme dengan konsep Kerjasama Internasional pada isu lingkungan hidup, melalui tiga hal, yakni kepentingan bersama antara Indonesia dan Jepang, partisipasi kedua pihak, dan perolehan yang didapat oleh kedua negara. Sehingga hasil dari penelitian bahwa JCM telah memenuhi kepentingan bersama kedua negara, tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tetapi juga pihak swasta, serta memberikan keuntungan, baik bagi Jepang maupun Indonesia. JCM menjadi sebuah kerjasama yang memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang di masa depan. Adapun perbedaan penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan tidak hanya untuk memberikan keuntungan dari kedua belah pihak. Tapi pada BMT ini kerjasama dilakukan untuk meningkatkan daya saing BMT dengan lembaga lain. Mengingat bahwa BMT tidak hanya sebagai *Baitul maal* tetapi juga sebagai *baitul tamwil*. Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa pada kerjasama yang dilakukan ini untuk saling menguntungkan kepada kedua belah pihak yang dimana untuk kepentingan bersama, partisipasi bersama dan perolehan untuk kedua belah pihak.⁸⁶

⁸⁵Yanuar Pribadi, "Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* p-ISSN 20870825 e-ISSN 25486977 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021

⁸⁶Liana Hasanah dan Viani Puspitasari, Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia, *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* e-ISSN: 2684-8082 Vol. 1 No. 2, Agustus 2019 (142-155) doi: 10.24198/padjir.v1i2.26131

I. METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yakni dengan melakukan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen dengan objek penelitiannya yaitu inklusi keuangan sosial berbasis digital dan kerjasama dalam meningkatkan daya saing BMT.

b. Jenis Penelitian

Field research dalam penelitian disertasi ini adalah jenis penelitian studi kasus pada multisitus. Penelitian studi kasus bisa dikatakan observasi yang mendalam tentang bagian dari individu, kelompok/komunitas, organisasi, program kegiatan dalam waktu tertentu. Tujuan adanya penelitian studi kasus untuk memperoleh deskripsi yang lengkap serta mendalam dari sebuah obyek penelitian. Penelitian studi kasus akan menghasilkan sebuah data data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Prosedur perolehan data penelitian kualitatif dalam studi kasus diperoleh berdasarkan sumber wawancara, observasi, pengamatan dan arsip.

Disebut sebagai penelitian lapangan karena penelitian menggunakan data-data dan sumber-sumber informasi lapangan. Tujuan dari penelitian lapangan itu adalah mendapatkan data yang diperlukannya berasal dari obyek penelitian yang senyatanya ada. Selain itu juga penelitian lapangan bertujuan untuk memperdalam pembahasan tentang latar belakang, status sosial dari suatu kelompok/lembaga/komunitas tertentu ataupun status sosial dari individu tertentu yang menjadi situs penelitian.

Penelitian bisa dikatakan *single case multisitus* karena penelitian disertasi ini memiliki karakteristik sebagaimana dijelaskan Yin⁸⁷ yaitu (1) merepresentasikan kasus kritis; (2) kasus ekstrim (*uniq*); (3) kasus mewakili yang lain; (4) merupakan kasus pernyataan (*revelator case*); (5) kasus yang panjang. Sedangkan *multisitus* yang dimaksud adalah karena penelitian ini digali dari berbagai lokasi yaitu beberapa BMT. Adapun objek yang menjadi situs dari penelitian yang sedang dilakukan ini adalah BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lembaga penelitian disertasi ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Lokasi penelitian disertasi didasarkan pada tujuan penelitian yaitu BMT yang melakukan digitalisasi dalam operasional dalam bidang baitul maal sosial syariah BMT dalam upaya meningkatkan daya saing. Selain itu juga kerjasama yang dilakukan oleh BMT bersama lembaga lainnya guna untuk mempermudah penyaluran dan penerimaan dana dari muzakki/wakif/muhnik. Didasarkan pada pemilihan lokasi penelitian yaitu BMT yang mengelola dana sosial syariah, maka wilayah penelitian ini pada lokasi di BMT UGT Nusantara dan BMT NU Ngasem Bojonegoro.

3. Karakteristik Informan

Penelitian ini menggunakan beberapa informan dalam setiap BMT yaitu manager BMT, karyawan pengelola dana sosial, anggota yang menyalurkan dana sosialnya dan pimpinan/orang terkait yang menjalankan kerjasama dana sosial

⁸⁷Robert K. Yin, *Case Study Research..... hal 39 - 42.*

tersebut. Kontribusi masing-masing responden memberikan tujuan untuk terpenuhinya kegiatan penelitian.

Manager dibutuhkan dalam penelitian ini dengan tujuan bahwa manajer adalah merupakan pembuat kebijakan dan pengambil keputusan atas pengelolaan dana sosial di BMT. Selain itu Manager BMT merupakan pencetus strategi dan kebijakan pengelolaan *baitul maal* di BMT.

Karyawan BMT yang ditunjuk untuk mengelola *baitul maal* BMT juga sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena karyawan inilah yang menangani praktek dilapangan, yang berhubungan langsung dengan anggota yang menyalurkan ataupun anggota yang menerima penyaluran.

Responden berikutnya adalah anggota BMT yang menyalurkan dana tersebut yang menjadi pelaku utama dalam implementasi keuangan sosial BMT dalam karena sebagai pengguna digitalisasi terkait dengan operasionalnya.

Responden terakhir yakni pimpinan/orang terkait yang menjalin kerjasama dengan pihak BMT dalam proses penyaluran dan penghimpunan dana. Karena dalam hal ini memastikan bahwa kerjasama berjalan dengan baik

Guna memastikan hasil penelitian ini tidak bias kepentingan, maka peneliti menjadikan ahli di bidang ekonomi dan Syariah untuk menanggapi hasil penelitian.

4. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif di beberapa BMT ini, peneliti perlu hadir ditempat/lokasi penelitian yaitu di setiap BMT yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti harus mencari dan mengumpulkan data penelitian untuk kemudian diamati aktivitas dan kegiatan

operasional yang ada di tempat penelitian. Untuk hal tersebut, tentu saja peneliti perlu bertemu dengan pihak-pihak terkait yang akan memberikan informasi atau data yang dibutuhkan secara jelas dan akurat. Untuk mendapatkan data dan informasi di setiap lokasi penelitian, peneliti dibantu oleh banyak pihak terkait, mulai dari pimpinan/manager BMT beserta para pegawainya sampai pada anggota BMT yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari sumber data yang primer dan sumber data yang sekunder.

a. Sumber Data yang Primer

Data primer itu adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama. Untuk memperolehnya dengan cara mewawancarai pelaku ditempat penelitian, mengobservasi tempat penelitian dan menggali dokumen yang ada di tempat penelitian⁸⁸ terkait tema yang diteliti. Jadi, sumber Data yang primer itu berupa data yang secara langsung didapatkan dari hasil wawancara pihak-pihak terkait yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam mengurus implementasi keuangan sosial syariah BMT. Adapun data responden penelitian ini adalah Manager BMT, karyawan BMT yang mengelola keuangan sosial syariah BMT, dan anggota dari BMT yang menjadi muzakki dan lembaga yang bekerjasama dengan BMT.

⁸⁸John W. Creswell, "*Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*" (New Delhi: Sage Publication Ltd, 2009).

Peneliti menggunakan metode “*purposive sampling*” untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Disini peneliti melakukan pemilihan atas lembaga/informan penelitiannya dari lembaga/informan yang dapat dipercaya dan dianggap menguasai seluk beluk masalah yang diteliti.

Jadi, Sumber data yang primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada Manajer/Direktur BMT, Karyawan BMT, Anggota BMT dan lembaga yang bekerja sama dengan BMT yang menjadi informan dalam penelitian disertasi ini.

b. Sumber Data yang Sekunder

Sumber Data yang sekunder dalam penelitian disertasi ini bersifat sebagai pendukung dari data yang primer. Cara memperoleh data yang sekunder adalah dengan cara tidak langsung. Data diperoleh dokumen pendukung yang menjadi bahan bacaan peneliti seperti laporan RAT BMT, AD/ART BMT, Website Resmi BMT, Perkembangan Sosial Media kedua BMT dan sumber informasi pendukung tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

6. Pengumpulan Data

Berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, antara lain:

a. Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan langsung kepada pihak terkait agar memperoleh hasil wawancara yang valid sesuai kebutuhan. Peneliti berinteraksi secara langsung dan mendalam dengan pihak yang diwawancarai dengan menumbuhkan rasa

dekat, tanggungjawab, dan saling percaya, agar bisa berbagi informasi apapun baik secara lisan maupun tulisan terkait dengan objek penelitian.

Adapun subjek yang diwawancarai dalam penelitian disertasi ini adalah yang bertanggungjawab, yakni Manager BMT. Wawancara ini akan dilakukan secara terarah dan insentif yang didasarkan pedoman wawancara yang telah dirancang oleh peneliti sebelumnya.

b. Observasi

Kegiatan penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan teknik observasi. Teknik Observasi pada disertasi ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara mendalam dan observasi langsung pada obyek lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi yang terjadi serta membuktikan keabsahan dari sebuah desain penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian ini observasi dilakukan secara langsung oleh penulis disertasi pada kantor pusat BMT UGT Nusantara dan kantor BMT NU Ngasem Bojonegoro. Observasi juga dilakukan dengan melihat fenomena perkembangan BMT melalui sosial media BMT seperti Facebook, Instagram maupun Website BMT UGT Nusantara dan BMT NU Ngasem Bojonegoro.

c. Studi Pustaka

Selain dengan wawancara dan observasi, peneliti disertasi ini juga menggali data penelitiannya dengan berbagai cara lain seperti dengan membaca buku-buku pendukung, menganalisis, mengkaji, serta membuat catatan-catatan yang diperlukan, seperti literatur inklusi keuangan, digitalisasi, kerjasama, daya saing dan BMT. Selain itu juga, berupa dokumen serta tulisan-

tulisan yang berkaitan dengan unsur-unsur penting yang diteliti laporan tahunan BMT, Undang-undang dan dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang dipilih untuk penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan studi kasus. Metode penelitian tersebut dilakukan dengan model analisis interaktif terhadap komponen pengumpulan data dari berbagai siklus. Yin, Stake, dan Helen dalam melakukan penelitian studi kasus, memberikan beberapa tahapan dalam melakukan penelitian, yakni: 1. Dengan menentukan dan mendefinisikan pertanyaan penelitian; 2. Memilih kasus dan menentukan data teknik pengumpulan dan analisisnya; 3. Siap dalam mengumpulkan data; 4. Mengumpulkan data di lapangan; 5. Melakukan evaluasi dan analisis data; 6. mempersiapkan laporan penelitian.

Langkah analisis studi kasus dilakukan sebagaimana menurut Atkinson⁸⁹ adalah *pertama* mengusulkan pembuatan repositori data menggunakan teori basis data relasional dasar. *Kedua* melibatkan pembuatan kode untuk mengidentifikasi data yang masih tercecer. Kode-kode yang dihasilkan ini kemudian dianalisis dan dirasionalisasi. *Ketiga* melibatkan analisis data studi kasus dengan menghasilkan berbagai laporan. *Keempat* menghasilkan proposisi akhir dengan menghubungkan kode yang dirasionalisasi kembali ke proposisi awal dan di mana proposisi baru

⁸⁹John Atkinson, "Four Steps to Analyse Data from a Case Study Method" (presented at the ACIS, ACIS 2002 Proceedings, 2002).

yang sesuai dihasilkan. Hasil keempat langkah ini mencerminkan inklusi keuangan sosial berbasis digitalisasi dan kerjasama pada BMT.

Tahapan gerak peneliti dalam melakukan analisis data, meliputi:

a. Kondensasi data (*data Condensation*)

Cara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan merangkum data-data penting, kemudian melakukan seleksinya untuk bisa memperoleh tema dan pola penelitiannya. Peneliti akan memfokuskan pada data-data penting dan akan melakukan reduksi data. Reduksi data ini akan menjadikan peneliti mudah dalam mengumpulkan dan mencari data-data terkait berikutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Data display yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk penjelasan singkat, hubungan antara kategori, bagan, *flowchart* ataupun sejenisnya. Dengan menyajikan data akan lebih mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, serta merencanakan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Untuk kepentingan verifikasi, peneliti harus mampu menarik kesimpulan, dengan cara mengulang secara teliti dari tahap awal pengumpulan data yang sudah diperoleh terdahulu setelah data disajikan.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan kualitas desain penelitian dilakukan sebelum dimulainya pengamatan sampai dengan data telah dihasilkan. Peneliti juga melakukan validasi data sehingga semakin kuat penelitian dilakukan. Kredibilitas dari data yang diperoleh dalam penelitian harus menjadi fokus utama. Harus dicek benar di

lapangan apakah data yang diperoleh sudah valid atau belum, ada perubahan atau tidak. Jika data sudah kredibilitas maka pengamatan dapat diakhiri.

Keabsahan data yang diperoleh dilapangan dinyatakan kredibel jika terbukti sesuai dengan kenyataannya. Untuk menentukan kredibilitas suatu data ada kriteria yang dipakai yakni ketika menggunakan teknik pemeriksaan berikut ini:

a. Perpanjangan kehadiran peneliti.

Jika diperlukan untuk mencari kebenaran dan mencapai validitas data yang diteliti, maka peneliti bisa memperpanjang kehadirannya dilapangan. Peneliti melakukan *cross check* data lebih lanjut untuk mencari validitasnya.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah kegiatan membandingkan data yang diperoleh untuk meyakinkan keabsahan data yang diperoleh. Ada tiga bentuk Triangulasi yang bisa dipakai, yakni:

1) Triangulasi Waktu

Dengan cara membandingkan waktu ketika observasi/pengamatan penelitian dan wawancara, karena waktu juga dianggap dapat mempengaruhi jawaban dari responden. Misalnya pagi hari responden penelitian masih sangat antusias dalam menjawab sehingga data yang diperoleh lebih akurat dibandingkan siang sore ataupun malam hari.

2) Triangulasi metode

Dalam hal ini peneliti membandingkan metode yang berbeda-beda untuk pencarian data yang sama. Misalnya data yang sama didapat dengan metode yang berbeda. Data yang sama diperoleh dari wawancara, observasi

dan dokumentasi. Kemudian hasilnya dibandingkan dan selanjutnya disimpulkan. Dari situ diperoleh data yang terpercaya.

3) Menggunakan triangulasi sumber

Yaitu dengan cara membandingkan beberapa sumber asal data diperoleh. Misalnya sumber data dari pihak pengelola, karyawan dan konsumen.

9. Tahapan Penelitian

a. Tahap pertama adalah Pra Lapangan

- 1) Dibuat usulan penelitian dalam suatu rancangan penelitian dalam sebuah proposal.
- 2) Menentukan lokus penelitian.
- 3) Mengurus dan mengajukan surat ijin penelitian
- 4) Mengamati lokus penelitian dengan melakukan observasi pra penelitian.
- 5) Menentukan informan yang akan digendeng dalam penelitian.
- 6) Menjunjung tinggi etika penelitian.

b. Tahap kedua aktifitas di lapangan

- 1) Mempelajari seluk beluk dan latar belakang obyek penelitian
- 2) Melakukan persiapan diri dalam observasi, pastikan kebutuhan penelitian sudah dilengkapi agar data yang didapatkan bisa maksimal
- 3) Memasuki obyek penelitian lapangan.
- 4) Bertindak secara pro-aktif dalam mengumpulkan setiap element data.

c. Tahap ketiga Analisis Data

Diawali dengan melakukan wawancara mendalam dengan subyek penelitian yang ada di BMT-BMT. Kemudian dilanjutkan validasi data

dengan melakukan triangulasi (pengecekan keabsahan data dengan triangulasi baik secara sumber dan metode). Sehingga data-data yang diperoleh dalam lapangan sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.

d. Tahap keempat Pelaporan Data

Tahap keempat ini merupakan tahapan akhir dari penelitian disertasi yang dilakukan; yakni membuat laporan hasil penelitian yang bentuk formatnya sudah formal sesuai dengan aturan penulisan hasil penelitian yang tercantum dalam buku pedoman penulisan karya disertasi milik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Sesuai dengan pedoman penulisan disertasi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pada bab ini berisikan pendahuluan yang berisikan; konteks penelitian, batasan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II Pada bab II peneliti membahas tentang potret dan perkembangan BMT serta gambaran umum lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yakni 2 BMT; BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro. Peneliti juga mengungkapkan tentang keuangan sosial BMT yakni ZISWAF pada kedua lembaga.

- BAB III** Pada bab III ini diawali dengan Bagaimana inklusi keuangan sosial berbasis digital dalam upaya meningkatkan daya saing pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro? Peneliti akan mengawali penulisan dengan bagaimana sistem digital yang dikembangkan oleh BMT, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam digitalisasi produk *baitul maal* BMT, teknik pengoprasian digitalisasi *baitul maal* BMT dan Strategi digitalisasi *baitul maal* BMT.
- BAB IV** Pada bab IV ini peneliti membahas pertanyaan ke 2 yakni Bagaimana inklusi keuangan sosial berbasis kerjasama dalam upaya meningkatkan daya saing pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro?. Peneliti dalam bab ini kan mengupas terkait dengan apa itu kerjasama BMT, Teknik Kerjasama Baitul Maal BMT, Manfaat dan Keuntungan Kerjasama BMT.
- BAB V** Pada bab V ini peneliti akan membahas rumusan masalah ke 3 yakni bagaimana upaya peningkatan daya saing berbasis digital dan kerjasama pada BMT?. Peneliti akan membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi BMT dalam proses digitalisasi dan kerjasama pada bidang keuangan sosial.
- BAB VI** Pada Bab VI ini berisi tentang penutup yakni kesimpulan dan saran serta rekomendasi penulis.